



## Pemkab Masih Utang ke 3 Kalurahan

BANTUL—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul diketahui masih memiliki utang pembayaran uang sewa tanah Stadion Sultan Agung (SSA) ke tiga kalurahan, yakni Trimulyo, Kapanewon Jetis; Timbulharjo, Kapanewon Sewon; dan Wonokromo, Kapanewon Pleret selama 1,5 tahun dengan total besaran ratusan juta rupiah.

Ulu-Ulu Kalurahan Trimulyo, Wikan Werdo Kisworo, mengatakan sejak awal pembangunan kompleks SSA, Pemkab telah menyewa tanah kas desa (TKD) Trimulyo, Timbulharjo dan Wonokromo selama 20 tahun. Sewa tersebut juga sudah mendapatkan persetujuan dari Gubernur DIY, Sri Sultan HB X.

“Sewa selesai pada November 2023. Ketiga kalurahan juga telah mengajukan surat enam bulan sebelum masa sewa habis ke Pemkab untuk mengingatkan sewa segera berakhir,” ungkapnya kepada *Harian Jogja*, Senin (24/2).

Setelah pelayangan surat tersebut, Pemkab kemudian mengajukan izin perpanjangan sewa tanah untuk SSA ke Gubernur DIY karena sesuai dengan regulasi izin sewa dan penggunaan TKD ada di Gubernur DIY.

Dalam perkembangannya, Gubernur DIY mengeluarkan surat rekomendasi perpanjangan sewa tanah selama 20 tahun, sama seperti sewa sebelumnya. Namun, sebelum Pemkab membayar sewa tanah selama 1,5 tahun sejak habis sewa November 2023 sampai saat ini, ada aturan dari Pemda DIY agar dibentuk tim *appraisal* untuk menghitung luasan tanah dan besaran sewa tanah yang disesuaikan dengan harga sewa tanah yang saat ini berlaku.

“Saat ini kami masih menunggu tindak lanjut dari Pemkab. Jadi kalau dihitung sejak lanjut sewa kemarin sampai saat ini, sudah 1,5 tahun kami belum mendapatkan pembayaran sewa dari Pemkab,” ungkap Wikan.

Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul Andus Sarwana mengakui dinasny telah menganggarkan sekitar Rp400 juta untuk pembayaran sewa tanah SSA selama 1,5 tahun di APBD 2024.

Namun, karena izin perpanjangan sewa tanah SSA dari Gubernur DIY baru keluar setelah tahun anggaran berakhir, Pemkab tidak bisa membayarkan. Utang masih belum bisa dibayar menyusul terbitnya Peraturan Gubernur soal pembentukan tim *appraisal*.

“Pembayaran menunggu kerja tim *appraisal*,” ungkapnya. Sejak awal dibangunnya kompleks SSA, Pemkab merancang kawasan tersebut sebagai pusat olahraga. Hanya saja karena keterbatasan anggaran, maka sejauh ini ada sejumlah fasilitas yang belum terbangun, seperti kolam renang. (Jumali)